

Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara

Harits Hafiid

**Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)**

haritshafiid@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Fokus yang diteliti yaitu dilihat dari Aspek standar pengujian kendaraan, Aspek Upaya Kerja dan Aspek Dukungan Organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan studi dokumentasi serta melakukan analisis data yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran dinas perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan barang dan masyarakat di wilayah kota administrasi jakarta utara dinyatakan sudah baik dan efektif. Hal ini didasarkan pada rumusan kesimpulan yaitu bahwa dinas Perhubungan yang mempunyai tugas pokok adalah membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor serta pengelola penerimaan retribusi atau pendapatan asli daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan dinas perhubungan DKI jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang bagi operasional pengujian kendaraan bermotor masih perlu melakukan perbaikan. Pimpinan dinas Perhubungan selalu melakukan penilaian kinerja untuk mengukur sejauh mana pegawai di dinas perhubungan mencapai target organisasi hal ini juga diharap menjadi perbaikan bagi organisasi dan juga raport bagi para pegawai sehinggannya apabila ada yang kurang tercapai maka organisasi segera melakukan perbaikan dan juga peningkatan kualitas baik itu sarana maupun prasarana sebagai bentuk dukungan organisasi kepada para pegawai untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya.

Kata kunci : Pengujian Kendaraan, Masyarakat, Dinas Perhubungan (DISHUB).

ABSTRACT

This study aims at the Role of the Transportation Agency in Testing Goods and Community Transport Vehicles in the North Jakarta Administrative City Region. The focus under study is seen from the aspects of vehicle testing standards, Aspects of Work Efforts and Aspects of Organizational Support. The research method used is a method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation studies and analyzing data related to the focus of research problems. The conclusion of the research results shows that the role of the transportation agency in testing goods transport vehicles and communities in the northern Jakarta administrative city area is declared to be good and effective. This is based on the formulation of conclusions, namely that the Department of Transportation which has the main task is to assist the Head of Service in the implementation of regional government in carrying out the testing of

motorized vehicles as well as managers of receipts of regional revenue or revenue as stipulated in the legislation. motorized vehicle testing services carried out by DKI Jakarta Transportation Agency in accordance with the applicable laws and regulations and the availability of facilities and infrastructure that support the operational testing of motorized vehicles still need to make improvements. The head of the Transportation Agency always performs performance assessments to measure the extent to which employees at the transportation office achieve the target of the organization. It is also expected to be an improvement for the organization and report cards for employees so that if there is something that is not achieved, the organization will immediately improve and improve quality. and infrastructure as a form of organizational support to employees to improve the quality of their work.

Keywords : Vehicle Testing, Society, DISHUB.

PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan perekonomian, sosial dan kebudayaan suatu negara karena berperan sebagai alat yang memungkinkan pergerakan orang dan atau barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam waktu relatif singkat, efisien dan efektif.

Pengertian transportasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai : pemindahan muatan barang atau manusia dari satu tempat wilayah asal ketempat wilayah yang lainnya sebagai tujuan. Dimana dalam pelaksanaan transportasi itu diatur oleh undang-undang dengan tujuan mewujudkan lalu lintas, angkutan jalan, perkeretaapian, penerbangan dan pelayaran dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok

wilayah daratan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor harus mampu menjamin daya jangkau dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pada dasarnya, persyaratan teknis dan laik jalan diberlakukan wajib bagi seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan namun pada saat ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 jenis kendaraan yang diwajibkan untuk melakukan uji berkala baru terbatas pada kendaraan penumpang umum dan barang.

Pengujian kendaraan bermotor secara umum dilaksanakan selain dalam rangka menjamin keselamatan dan pelayanan umum, juga merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas udara di luar ruangan terutama di jalan raya serta permukiman yang berada pada lintasan angin yang berasal dari jalan raya. Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam menjalankan pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan langkah preventif. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

telah diwajibkan bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus dilakukan pengujian.

Jenis-jenis kendaraan tersebut yang wajib untuk pemeriksaan dan pengujian laik jalan kendaraan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Dinas Perhubungan harus mengoptimalkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Keberadaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perhubungan transportasi darat, maka dari itu Dinas Perhubungan dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna kendaraan bermotor agar mereka mau melakukan uji kelayakan kendaraan. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan pemeriksaan pada kondisi kendaraan yang dilakukan oleh penguji apakah kendaraan tersebut memenuhi persyaratan laik jalan atau tidak, termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang merupakan kewenangan dari Perhubungan. Dari pemeriksaan kondisi fisik kendaraan tersebut, maka sangat dibutuhkan pelayanan dalam kelancaran pengujian kendaraan bermotor itu sendiri.

Permasalahan dibidang transportasi adalah masalah kecelakaan lalu lintas dan masalah lingkungan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas adalah kondisi kendaraan. Dalam upaya untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas serta pengendalian masalah lingkungan, langkah yang dilakukan adalah melalui Pengujian Kendaraan bermotor. Tujuan penyelenggaraan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor (PBKB) adalah untuk memberi jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor, melestarikan lingkungan dari kemungkinann pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan, memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan agar dapat terciptanya transportasi darat yang sesuai dengan kelayakan untuk berada dijalan dan juga agar pelanggan transportasi darat merasa aman, nyaman, cepat/lancar, dan tertib/teratur agar mereka lebih percaya pada sarana transportasi yang digunakan.

Untuk mewujudkan suatu tatanan transportasi yang efektif dan efisien maka sistem transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem yang

pengembangannya dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang terdiri atas jaringan prasarana, jaringan pelayanan, kendaraan dan manusia serta peraturan dan prosedur yang sedemikian rupa sehingga terwujud situasi lalu lintas yang tertib, nyaman, lancar dan selamat. Program Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikembangkan saat ini adalah Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersifat menyeluruh (emisi dan kelaikan jalan) dan sebagai pelaksanaanya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku di Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor saat ini mendapat kritik yang cukup tajam dari berbagai kalangan masyarakat, mengingat pengalaman Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilakukan Pemda saat ini. Kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor angkutan umum dan barang saat ini rawan dengan penyimpangan. Bahkan lebih jauh lagi, kendaraan yang akan diuji berkala dapat menyewa sementara kelengkapan kendaraan seperti kaca spion dan ban yang tidak gundul, hanya untuk memenuhi proses uji. Setelah proses uji berkala selesai dilakukan, barang-barang yang disewa tersebut dikembalikan. Uji kir seharusnya dilakukan dengan ketat,

bukan cuma formalitas. Pengawasan terhadap uji kelayakan bukan berarti kendaraan harus diuji sesering mungkin, melainkan uji kelayakan dijalankan rutin sesuai prosedur yang berlaku.

Pengujian kendaraan bertujuan untuk mengurangi banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh kelayakan kendaraan bermotor yang tidak lolos uji. Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua aspek yaitu: 1. Aspek Keselamatan (safety) 2. Aspek Pencemaran (pollution). Aspek keselamatan menyangkut kelaikan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor. Dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor guna memastikan kelaikan jalannya serta tingkat emisi yang dihasilkannya terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Dinas Perhubungan menempatkan transportasi sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan, termasuk bidang transportasi merupakan tantangan dan tanggung jawab yang besar bagi Dinas Perhubungan dalam menciptakan keterbukaan dan kemudahan bidang

transportasi. Dinas Perhubungan berusaha menciptakan system transportasi yang aman, lancar dan tertib agar masyarakat merasa nyaman berkendara. Meningkatkan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan menghindarkan masyarakat dari kesesatan dalam perjalanan.

Meningkatkan kualitas pelayanan Angkutan Umum dengan memberikan pemahaman pada Kru Angkutan tentang Peraturan / Undangundang Lalu Lintas. Apabila melihat fakta dijalan terkait kondisi fisik sebagian besar angkutan penumpang maupun angkutan barang jauh dari kata layak. Seringkali ditemui angkutan penumpang yang mogok di pinggir jalan sehingga mengganggu kenyamanan berkendara.

KERANGKA ANALISIS / LANDASAN KONSEPTUAL

Dalam peneliiian ini menggunakan teori Menurut (Mangkunegara, 2005 : 67) yang mengemukakan Pengertian kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut lagi, Mangkunegara menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu

kinerja individu dan kinerja organisasi, kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang

telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok.

Gambar II.I
Model Alur Pikir



Sumber : Mangkunegara, 2005 : 67

METODE PENELITIAN

Jenis Di dalam penelitian mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, penulis menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa penelitian ini hanya menggambarkan proses atau keadaan yang ada pada saat ini atau masa sekarang serta masalah-masalah aktual

yang berhubungan dengan variable yang ada di dalamnya.

Definisi penelitian deskriptif menurut Koentjaraningrat (1983:42) adalah penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala atau kelompok-kelompok tertentu, menentukan frekuensi, penyebaran suatu gejala atay frekuensi adanya hubungan tertentu dalam suatu gejala lain dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif

adalah hanya menuturkan dan menafsirkan data yang ada, yaitu keadaan gejala apa adanya saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan.

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif menurut STIA LAN (2001:14) adalah :

“menekankan pada segi pengamatan langsung secara partisipatif sehingga diungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakangi dimana diperlukan ketajaman dan kecermatan dalam mengamati dan menarik inferensi kesimpulan atas fenomena-fenomena yang tampak.”

Sehubungan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka pendekatan ini ditujukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang kondisi atau fakta yang ada (apa adanya) tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan bagi penelitian ilmiah. Sehubungan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui kegiatan:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara/interview

merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama. Sutopo (2006: 72).

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara bebas yaitu berupa dialog atau tanya jawab kepada narasumber yang dalam hal ini adalah pegawai atau pejabat

dinas terkait untuk mendapatkan data primer. Sedangkan alat yang digunakan untuk menggali informasi adalah dengan *interview guide*, yaitu daftar pertanyaan yang ditujukan pada pelaksana program untuk mendapat informasi yang dibutuhkan.

2. Telaah Dokumen

Telaah dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data serta informasi yang bersumber dari literature berupa buku, majalah, laporan, koran, bulletin, tulisan-tulisan ilmiah dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis Data

Sehubungan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka analisis data dilakukan secara keseluruhan dan sistematis bersamaan dengan pengumpulan data berdasarkan dengan satuan-satuan gejala yang diteliti. Menurut Syafrizal Helmi Situmorang, Iskandar Muda, Doli M. Ja'far Dalimunte, Fadli, Fanzie Syarief (2010:9) analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Para

peneliti berpendapat bahwa tidak ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Karena itu, maka prosedur analisis data dalam penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

Aspek Standar Pengujian Kendaraan Bermotor

Balai pengujian kendaraan bermotor merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas pokok adalah membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor serta pengelola penerimaan retribusi atau pendapatan asli daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala pengujian kendaraan bermotor yang juga sebagai Penguji kendaraan bermotor yang memiliki sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan, serta dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh beberapa staf administrasi.

Peralatan pengujian kendaraan bermotor yang ada di dinas perhubungan

untuk pemeriksaan kelaikan jalan yang ada dibalai pengujian kendaraan sudah lengkap antara lain:

1. Alat Uji Suspensi Roda (Pit Wheel Suspension Tester) untuk memeriksa kondisi suspensi roda apakah masih mampu menahan getaran.
2. Alat Uji Rem (Brake Tester) memeriksa efisiensi sistem rem.
3. Alat Uji lampu Utama(Head Light Tester) memeriksa pancaran lampu utama dan deviasi penyinaran lampu.
4. Alat Uji Speedometer (Speedometer Tester) alat penunjuk kecepatan.
5. Alat Uji Emisi Gas Buang (CO-HC) alat uji asap kendaraan bermotor berbahan bakar premium (Bensin).
6. Smoke Tester alat uji asap kendaraan berbahan bakar Solar.
7. Alat Pengukur Berat (Axle Load) alat timbang berat sumbu depan dan belakang untuk menentukan jumlah berat muatan yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
8. Alat Uji Kincup Roda Depan (Side Slip Tester) memeriksa sikap roda depan pada kondisi tanpa beban dengan kecepatan maksimum Lima kilometer/jam.

9. Alat Ukur Suara (Sound Level Meter) alat ukur tingkat suara klakson.
10. Alat Pengukur Dimensi. Untuk mengukur panjang, lebar, tinggi kendaraan.
11. Alat Uji Kaca untuk menguji kemampuan kaca kendaraan.
12. Kompresor Udara.
13. Generator Set.
14. Peralatan Bantu (palu,senter).

Mekanisme Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor menyangkut kelaikan kendaraan yang lazim dikenal dengan Uji kendaraan bermotor atau dalam bahasa keseharian disebut Keur/KIR dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Instansi Dinas Perhubungan. Pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di balai pengujian kendaraan bermotor yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Perhubungan

Harits HAFiid

terutama dalam menunjang keselamatan para pelanggan transportasi darat merasa aman, nyaman, cepat/lancar, dan tertib/teratur agar mereka lebih percaya pada sarana transportasi yang digunakan yang tentunya tidak luput dari ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengujian kendaraan bermotor.

Menurut key informan penulis yaitu dari unsur masyarakat mengatakan bahwa “pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan dinas perhubungan DKI Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang bagi operasional pengujian kendaraan bermotor sudah baik dan lengkap.”

Adapun yang menjadi Landasan yuridis atau dasar hukum pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Balai Pengujian kendaraan bermotor sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dari Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang LLAJ yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan.
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor.
6. Keputusan Menteri Nomor 37 Tahun 2002 tentang Syarat Teknis Sabuk Pengaman.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1076/KP.108/DRJD/2005 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor.
8. Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Dinas Perhubungan .

Unit Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan teknis serta peraturan daerah menetapkan mekanisme Pelayanan Uji kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Pemohon atau pemilik kendaraan datang ke Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dengan membawa kendaraan dan kelengkapan surat atau berkas administrasi.
2. Berkas administrasi di berikan kepada petugas Verifikasi berkas untuk persyaratan perlengkapan sebagai berikut :
 - A. Uji Kendaran Baru (Uji Pertama).

- Surat Permohonan Uji Kendaraan dari Diler kepada Kepala Dinas Perhubungan ,Cq Kepala Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan .
 - Buku Spesifikasi Kendaraan.
 - STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan).
 - Foto Copy KTP.
 - Foto Copy Sertifikat Uji Tipe.
- B. Uji Berkala berikutnya dan seterusnya secara periodik.
- Mengisi dan melengkapi formulir Pengujian Berkala.
 - Membawa Buku Uji (Buku Keur) yang lama.
3. Berkas sudah lengkap di bawa ke bagian Pendaftaran, untuk kendaraan baru dibuatkan kartu kontrol yang baru dan untuk kendaraan Uji berkala lanjutan petugas mengisi kartu kontrol yang sudah ada sesuai identitas kendaraan, selanjutnya petugas pendaftaran menyerahkan berkas kepada petugas Penguji.
 4. Petugas Penguji akan melaksanakan Uji Kendaraan dengan menggunakan peralatan Uji yang ada.
 5. Kemudian Penguji membuat Penetapan Uji Kendaraan.
 6. Kendaraan yang ditetapkan Tidak Lulus Uji, Petugas Penguji Wajib memberitahukan secara tertulis yakni perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan, menetapkan serta penyesuaian waktu dan Tempat dilakukan pengujian ulang pada kendaraan.
 7. Kendaraan yang ditetapkan Lulus Uji yang dilanjutkan dengan Pemasangan Plat Uji (Peneng) atau tanda Uji yang telah ditandai dengan kode wilayah pengujian, nomor Uji Kendaraan, masa berlaku Uji berkala serta Tanda Samping dengan menggunakan Sablon atau stiker yang ditempelkan pada bagian luar kendaraan oleh petugas Penguji atau oleh staf administrasi yang membantu petugas Penguji.
 8. Pemilik kendaraan membawa nota penetapan Lulus Uji kepada petugas administrasi Penetapan Biaya Uji sekaligus membayar Biaya Uji atau Retribusi dan menandatangani bukti pembayaran.
 9. Petugas administrasi melakukan pengisian identitas kendaraan yang telah lulus Uji pada Buku Uji, untuk kendaraan Baru diberikan Buku Uji yang baru serta melakukan pengisian identitas kendaraan baru pada buku Uji.

10. Petugas Administrasi memberikan Buku Uji untuk Penandatanganan oleh Petugas Penguji. Petugas Penguji menyerakan Buku Uji kepada pemilik kendaraan.

Ketentuan Umum Pengelolaan PAD.

Dalam perkembangan intensitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di perlu di imbangi dengan pelayanan, baik yang bersifat ketatausahaan maupun pemberian perizinan yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menutupi biaya operasional terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk itu Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan melakukan pemungutan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) atau keuangan daerah termasuk didalamnya retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas dibalai pengujian kendaraan bermotor guna membiayai Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Retribusi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
4. Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan banyaknya Pelayanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
6. Wilayah pemungutan di daerah tempat pelayanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberikan. Masa retribusi adalah jangka waktu pengujian kendaraan bermotor yang berlaku selama 6 (Enam) Bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan tarif yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatas, maka menjadi kewajiban bagi yang wajib retribusi yang mendapatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor diwajibkan untuk membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor yang telah ditetapkan secara berkala sesuai dengan jenis Kendaraan yang di Uji, baik kendaraan wajib Uji yang berdomisili di maupun kendaraan dari luar daerah untuk Numpang Uji.

1. Aspek Upaya Kerja

Adapun aspek upaya kerja terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Aspek kuantitatif terdiri dari :

1. Proses kerja dan kondisi pekerjaan.
2. Waktu lamanya yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan.
3. Jumlah kesalahan dalam melakukan pekerjaan.
4. Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja.

Sedangkan aspek kualitatif meliputi :

1. Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan.
2. Tingkat kemampuan dalam bekerja.

3. Kemampuan dalam menggunakan peralatan dalam bekerja.
4. Kemampuan dalam mengevaluasi keluhan publik.

Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor telah melakukan upaya kerja melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. Adapun yang dilakukannya antara lain :

- Melaksanakan pengujian berkala pertama kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan;
- Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil bus sedang, mobil bus besar, dan angkutan umum lingkungan;
- Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor rubah bentuk , peremajaan, dan mutasi dari luar daerah;
- Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor di tempat/touring, sesuai dengan huruf (a) dan (b);
- Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;

Harits HAFiid

- Pelaksanaan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Penyusunan standar dan prosedur pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- Pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- Perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor;
- Pelaksanaan administrasi kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- Melaksanakan penetapan daya angkut dan teknis laik jalan serta pengesahan hasil uji;
- Pencatatan dan pelaporan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- Penyedia, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor;
- Pelaksanaan publikasi kegiatan;
- Pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan tata usaha;
- Penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi;

Pada aspek ini key informan penulis yaitu Kepala Dinas Perhubungan mengungkapkan bahwa :

”kami beserta tim kerja lapangan selalu menjaga kualitas kerja dan kuantitas pekerjaan kami sehingga meminimalisir adanya keluhan dari publik pengguna jalan namun demikian memang tidak dapat kami pungkiri ada beberapa pegawai yang memang kualitas kerjanya belum maksimal namun kami memiliki terus memperbaiki hal tersebut dengan cara supervisi agar mereka bisa bekerja sesuai tanggung jawab pekerjaan yang sudah mereka emban”.

Dari aspek-aspek diatas maka kinerja seorang pegawai dapat dilihat dari kualitas dan kuantitasnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya. Yang mana Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005:9) mengatakan kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Seorang pegawai pada organisasi masing-masing memiliki kinerja atau cara kerja yang berbeda-beda dan yang diharapkan oleh setiap organisasi pencapaian hasil yang maksimal dari kinerja pegawainya, oleh karena itu semua organisasi pasti memiliki standar pekerjaan, termasuk Dinas Perhubungan Bidang Pengawasan dan Pengujian kendaraan. Yang mana standar pekerjaan pada Dinas Perhubungan Bidang Pengawasan dan Pengujian kendaraan adalah hasil suatu pekerjaan yang harus sesuai dengan kualitas dan tanggung jawab kerja yang dihasilkan.

Standar pekerjaan tersebut diartikan oleh Nawawi (2006:115) yaitu acuan atau tolak ukur mengenai proses dan hasil pelaksanaan pekerjaan oleh seorang pegawai. Maksudnya jelas bahwa dengan adanya standar pekerjaan, maka akan dapat melihat kemampuan seorang pegawai. Hal ini sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh *key Informan*

Penulis yaitu kepala Dinas Perhubungan yang menyatakan bahwa :

”kami selalu menjalankan pekerjaan dengan mengacu pada SOP yang telah ada dan kami mentaati itu, apalagi kami bertugas pada bagian pengujian kendaraan yang mana standar pekerjaannya sudah jelas dan sudah ada dasar acuannya sehingga ini berlaku sama bagi anggota kami.”

Untuk mencapai suatu kinerja yang baik, maka diperlukan manajemen kinerja yang baik pula. Didalam Mangkunegara (2007:19), Ahmad S. Ruky mengatakan manajemen kinerja itu merupakan suatu bentuk usaha kegiatan atau program yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi atau perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan prestasi pegawai.

Selain itu juga didalam Mangkunegara (2007:19), Robert Bacal berpendapat bahwa manajemen kinerja itu merupakan suatu proses komunikasi yang terus menerus, dilakukan dalam kerangka kerja sama antara seorang pegawai dan atasan langsung.

Dari pengertian diatas jelas bahwasanya manajemen kinerja benar sangat dibutuhkan didalam suatu

Harits HAFiid

organisasi, dan yang harus memiliki ilmu manajemen kinerja tersebut jelas bahwa seorang pemimpin suatu organisasi. Selain itu manajemen kinerja ini dapat dikatakan sebagai pengendalian terhadap pencapaian kinerja. Yang mana, agar dapat melihat prestasi dari pada pegawainya.

Adapun tujuan dari manajemen kinerja ini terhadap para pegawai menurut Mangkunegara (2007:20) yaitu :

1. Membantu para pegawai untuk mengerti apa yang seharusnya mereka kerjakan dan mengapa hal tersebut harus dikerjakan serta memberikan kewenangan dalam mengambil keputusan.
2. Memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan baru.
3. Mengenali rintangan-rintangan peningkatan kinerja dan kebutuhan sumber daya yang memadai.
4. Pegawai memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pekerjaan dan tanggung jawab kerja mereka.

Dengan adanya manajemen kinerja didalam organisasi maka tujuan dari organisasi akan tercapai dengan efektif dan efisien, yang mana manajemen kinerja ini lebih mengarahkan kepada kerja pegawainya, karena hasil dari kerja

pegawai itu lah yang menjadi hasil pencapaian tujuan organisasi, maka dari itu sangat bermanfaatnya manajemen kinerja didalam organisasi yang dikuasai oleh seorang pimpinan.

Dan pengertian Kinerja pegawai itu sendiri adalah kemampuan seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya, serta pertanggung jawaban seorang pegawai terhadap wewenang yang telah diberikan kepadanya untuk menjalankan tugas yang diserahkan kepadanya dengan target tercapainya tujuan suatu organisasi atau instansi tempat dia bekerja secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut maka indikator kinerja dapat dikatakan terdiri dari :

1. Keterampilan kerja, merupakan penguasaan pegawai mengenai prosedur (metode/ teknik/ tata cara/ peralatan) pelaksanaan tugas-tugas jabatannya.
2. Kualitas pekerjaan, adalah kemampuan pegawai menunjukkan kualitas hasil kerja ditinjau dari segi ketelitian dan kerapian.

3. Tanggungjawab, adalah kesediaan pegawai untuk melibatkan diri sepenuhnya dalam melaksanakan pekerjaannya dan menanggung konsekuensi akibat kesalahan atau kelalaian dan kecerobohan pribadi dalam melaksanakan tugas
4. Prakarsa, merupakan kemampuan pegawai dalam mengembangkan ide atau gagasan dan tindakan yang menunjang penyelesaian tugas.
5. Disiplin kerja, adalah kesediaan pegawai dalam mematuhi peraturan perusahaan yang berkaitan dengan ketepatan waktu masuk/ pulang kerja, jumlah kehadiran, dan keluar kantor bukan untuk urusan dinas.
6. Kerjasama, merupakan kemampuan pegawai untuk membina hubungan dengan pegawai lain dalam rangka menyelesaikan tugas.
7. Kemampuan, pegawai dalam menyelesaikan sejumlah hasil tugas setiap harinya.

Ketujuh indikator diatas menurut pengamatan penulis pada dinas perhubungan secara keseluruhan

sudah dilaksanakan dan diterapkan dalam aktifitas pekerjaan sehari-hari.

2. Aspek Dukungan Organisasi

Kinerja bisa berarti hasil kerja ataupun prestasi kerja pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari hasil atau tidaknya mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

konsep kinerja merupakan singkatan dari Kinetika Energi Kerja yang padanannya dalam bahasa Inggris "*performance*" yaitu : keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau profesi dalam waktu tertentu. Pekerjaan adalah aktivitas menyelesaikan sesuatu atau membuat sesuatu yang hanya memerlukan tenaga dan keterampilan tertentu. Sementara itu profesi adalah pekerjaan yang untuk menyelesaikannya memerlukan

penguasaan dan penerapan teori ilmu pengetahuan yang dipelajari dari lembaga pendidikan tinggi. Suatu pekerjaan atau profesi mempunyai fungsi atau indikator yang dapat digunakan untuk meng-ukur hasil pekerjaan tersebut.

Selanjutnya Unsur-unsur yang perlu digunakan dalam mengukur pegawai adalah Sedarmayanti (2001:21):

1. Kekinerjaan adalah menilai kinerja pegawai dalam mematuhi peraturan yang ada dan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan.
2. Tanggung jawab adalah menilai kesediaan pegawai dalam mempertanggung jawabkan pekerjaan dan hasil kerjanya.
3. Kejujuran adalah menilai kejujuran dalam menjalankan tugas-tugasnya.
4. Kemampuan bekerjasama adalah menilai kesediaan pegawai dalam berpartisipasi dan bekerjasama dengan pegawai lain, sehingga hasil pekerjaan semakin baik.
5. Kesetiaan adalah menilai pegawai dalam pekerjaandan jabatannya.
6. Ketelitian adalah menilai ketelitian dalam menjalankan penyelesaian pekerjaanya.
7. Inisiatif adalah menilai kemampuan pegawai dalam menciptakan hal-hal baru dalam mensukseskan pekerjaannya.
8. Kondisi fisik adalah menilai stamina pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
9. Kepemimpinan adalah menilai kemampuan pegawai untuk memimpin dan memotivasi orang lain untuk bekerja.
10. Kemampuan mengambil keputusan adalah menilai kemampuan pegawai dalam mengambil keputusan dalam suatu keadaan.
11. Kecakapan adalah menilai hasil kerja pegawai baik kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan.

Key informan I penulis mengatakan bahwa :

“pimpinan dinas Perhubungan selalu melakukan penilaian kinerja untuk mengukur sejauh mana

pegawai di dinas perhubungan mencapai target organisasi hal ini juga diharap menjadi perbaikan bagi organisasi dan juga raport bagi para pegawai sehingga apabila ada yang kurang tercapai maka organisasi segera melakukan perbaikan dan juga peningkatan kualitas baik itu sarana maupun prasarana sebagai bentuk dukungan organisasi kepada para pegawai untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya”.

Selanjutnya menurut Desseler (dalam Pasolong 2008:182) bahwa penilaian kinerja adalah upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuan yaitu untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa berada diatas rata-rata. Schuler dkk (dalam Pasolong 2008:182) mengatakan bahwa sistem penilaian kinerja diartikan sebagai suatu proses penilaian kinerja yang pada pelaksanaannya dapat digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Komperatif.
2. Pendekatan Standar-Standar Absolut.
3. Pendekatan Tujuan.

4. Pendekatan Indeks yang bersifat langsung atau objektif.

Dalam melakukan penilaian kinerja agar penilaian bersifat obyektif, lebih terarah dan memberikan hasil memenuhi tujuan dari penilaian. Dibutuhkan langkah-langkah yang tepat seperti yang dikemukakan oleh Desler (dalam pawirosentono 1997 :3) adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi pekerjaan yaitu bahwa organisasi dan pegawai sepakat tentang tugas-tugas dan standar jabatan.
- b. Menilai kinerja yaitu membandingkan kinerja aktual pegawai dengan standar yang telah ditetapkan, ini mencakup beberapa formulir penilaian.
- c. Penilaian kinerja biasanya menuntut satu atau lebih sesi umpan balik.

Penilaian dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pegawai, Adapun perbaikan kinerja diukur dalam hal kecepatan, kualitas, layanan, dan nilai, Perbaikan kinerja pegawai dilakukan melalui pengukuran kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dalam

organisasi. Adapun manfaat dari pengukuran kinerja pegawai seperti yang dikemukakan oleh Efendi (dalam Indrastuti, 2008 : 50) yaitu:

1. Peningkatan prestasi kerja, dimana pimpinan maupun pegawai akan memperoleh umpan balik dan kesempatan mereka untuk memperbaiki pekerjaannya.
2. Kesempatan kerja yang adil, karena akan diperoleh kesempatan untuk menempati posisi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.
3. Kebutuhan akan pendidikan bagi pegawai yang mempunyai kemampuan dibawah standar kerja.

Ketiga hal diatas secara keseluruhan sudah diterapkan di dinas perhubungan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab-Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Peran dinas perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan barang dan masyarakat di wilayah kota administrasi jakarta utara masih perlu peningkatan kualitas dan pelayanan. Hal ini didasarkan pada rumusan kesimpulan sebagai berikut :

1. UPT pengujian kendaraan bermotor merupakan bagian dari dinas perhubungan yang mempunyai tugas pokok adalah membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor serta pengelola penerimaan retribusi atau pendapatan asli daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan dinas perhubungan DKI jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang bagi operasional pengujian kendaraan bermotor sudah baik dan lengkap.
3. Pimpinan dinas Perhubungan selalu melakukan penilaian kinerja untuk mengukur sejauh mana pegawai di dinas perhubungan mencapai target organisasi hal ini juga diharap menjadi perbaikan bagi organisasi dan juga raport bagi para pegawai sehingga apabila ada yang kurang tercapai maka organisasi segera melakukan perbaikan dan juga peningkatan kualitas baik itu sarana maupun prasarana sebagai bentuk dukungan organisasi kepada para pegawai untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya.

SARAN

Berkaitan dengan rumusan kesimpulan dan berdasarkan temuan penulis maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kinerja dinas perhubungan dalam hal pengujian kendaraan maka petugas harus menjaga kualitas yang sudah ada agar tidak menurun lagi. Hal ini tentu perlu adanya pebaharuan-pembaharuan pengetahuan dan tambahan keterampilan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi
2. Perawatan alat/sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja dalam pengujian kendaraan juga harus diperhatikan agar bisa sesuai dengan fungsinya.
3. Untuk menghindari pungli diharapkan jenis pembayaran apapun harus melalui bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.
4. Tetap menerapkan prosedur kerja untuk menjaga kualitas pelayanan sehingga complain masyarakat bisa diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Lilik A.M (2007), *Human Capital Competence: Sketsa-Sketsa Praktik Human Capital Berbasis Kompetensi*, Jakarta, PT. Alex Media Komputindo

Dessler, Gary (Penyunting) (2009), *Human Resource Management (Manajemen Sumber Daya Manusia)*, (jilid 2), Edisi Kesepuluh, Jakarta, PT Indeks

Dharma, Surya (2010), *Manajemen Kinerja Filsafah Teori dan Penempatannya*, Cetakan ke 19, Pustaka Pelajar

Handoko, T. Hani (2001), *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*-Yogyakarta: Edisi Kedua. BPFE

Hasibuan, H. Malayu S.P (2008), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Kesebelas (Edisi Revisi), Jakarta, PT. Bumi Aksara

Hutapea, Parulian & Thoha, Nurianna (2009), *Kompetensi Plus (Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis)*, Cetakan Pertama, Jakarata, PT Gramedia Pustaka Utama

Irawan, et.al (2002), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ketiga, Jakarta, STIA-LAN Press

Lembaga Administrasi Negara (2003), *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*, Buku I: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara, Jakarta, LAN RI

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, (2009), *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Cetakan Keempat, Bandung, PT. Refika Aditama

Manullang, M. (2008), *Dasar-Dasar Manajemen*, Cetakan ke 13, Ghalia Indonesia

Moeheriono, (2009), *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia

Moenir H.A.S, (2002), *Pendekatan Manusiawi Organisasi Terhadap Pembinaan Pegawai*. Jakarta: Haji Masagung

Harits HAFiid

- Moleong, Lexy (2005), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nawawi, H. Hadari, (2005), *Perencanaan SDM*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Nawawi, H. Hadari & M. Martini, (2001), *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Sedarmayanti,(2007), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Pertama, Bandung, Reflika ADITAMA
- Siagian, Sondang P (2000), *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: CV. Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. (2008), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Keenam belas, Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Sigiyono, (2009), *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan ke 17, Bandung, CV. ALFABETA
- Sulistiyani, Ambar Teguh & Rosidah, (2003), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama, Graha Ilmu
- Sutarto, (2000), *Dasar-Dasar Organisasi*, Cetakan ke 19, Universitas Gadjah Mada
- Thoha, Miftah, (2007), *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan kedua, Kencana Pranada Media Group
- Wibowo, (2008), *Manajemen Kinerja*, Edisi Kedua, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Zainun, H. Buchari (2004), *Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia